

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia salah satunya yaitu Pulau Jawa yang menjadi pusat perekonomian di Indonesia . Salah satu provinsi di Pulau Jawa yang memiliki potensi bagi perekonomian Indonesia adalah provinsi Jawa Barat yang memiliki kualitas laporan keuangan yang baik dan dinilai berhasil dalam menyusun dan menyajikan Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan capaian tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah, ini dibuktikan dengan diberikannya penghargaan dari Presiden RI Joko Widodo karena mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lima kali berturut turut. Adapun Kota/Kabupaten di provinsi Jawa Barat yang meraih WTP diantaranya Ada tujuh pemda yang meraih opini WTP dari tahun sebelumnya yakni, Kota Banjar, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cianjur, Kota Cimahi, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Tasikmalaya.Sementara itu, ada empat pemda yang meraih opini WTP untuk pertama kalinya yakni Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bogor, Kabupaten Garut, Kabupaten Karawang. Akan tetapi masih ada beberapa Kota/Kabupaten di provinsi Jawa Barat yang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) diantaranya Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Pangandaran dan Kota Cirebon.

Kota Bandung merupakan ibu kota Jawa Barat dan salah satu pusat perekonomian di provinsi Jawa Barat akan tetapi Kota Bandung termasuk dalam Kota yang masih belum mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini berarti dalam pengelolaan keuangannya masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan . Berikut merupakan opini yang diberikan BPK atas laporan keuangan pemerintah di Kota Bandung dari tahun anggaran 2009-2015.

**Tabel 1.1**  
**Daftar Opini Audit BPK atas LKPD Kota Bandung**  
**Tahun 2009 - 2015**

No	Tahun	Opini BPK
1	2009	Tidak Memberikan Pendapat ( <i>Disclaimer</i> )
2	2010	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
3	2011	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
4	2012	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
5	2013	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
6	2014	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
7	2015	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

Sumber : [bpk.go.id](http://bpk.go.id)

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa BPK memberikan opini pada Kota Bandung di tahun 2009 dengan opini Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer*), ini dikarenakan dalam penyajian dan pengungkapan dana bergulir pada masyarakat tidak disajikan sesuai nilai bersih yang dapat direalisasikan sebagaimana dinyatakan dalam standar akuntansi pemerintahan. di tahun 2010 cukup meningkat dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) Serta di tahun 2011-2015 masih konsisten dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) ini di karenakan masih adanya masalah aset yang belum terdata dengan akurat ([bpk.go.id](http://bpk.go.id)).

Sepanjang 2015 Kota Bandung di bawah kepemimpinan Wali Kota Ridwan Kamil berhasil meraih prestasi dan sejumlah penghargaan. Penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang mendapat nilai A, Wali Kota Bandung akan menargetkan untuk tahun yang akan datang meraih opini WTP dengan merencanakan program ke depan dalam waktu dekat adalah Adipura tingkat kelurahan ([pikiranrakyat.com](http://pikiranrakyat.com)). Opini Kota Bandung pada tahun 2015 hanya mendapatkan WDP dikarenakan adanya permasalahan mengenai aset, dalam hal ini Wali Kota Bandung

akan mengupayakan membentuk tim percepatan aset yang akan mengurus kejelasan aset di Kota Bandung, tahun ini Ridwan Kamil menargetkan 100 aset untuk diselesaikan sertifikasinya (detik.com).

## **1.2 Latar Belakang**

Reformasi Keuangan Negara oleh pemerintah salah satunya ditetapkan UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Laporan keuangan merupakan hal yang penting bagi pemerintahan pusat maupun daerah khususnya pada pasal 31 ayat (1) Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Laporan keuangan merupakan faktor penting bagi pemerintah yang harus diperhatikan dalam menyajikan laporan keuangan dan merupakan sebuah media bagi entitas (pemerintah) untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Karakteristik kualitatif dari informasi keuangan yang dihasilkan sangat penting bagi pemerintah agar informasi tersebut benar-benar bermanfaat bagi pengambilan suatu keputusan dan keputusan tersebut diharapkan dapat membawa pemerintahan ke arah yang lebih baik. Dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu dapat dipahami (*understandability*), relevan, andal (*reliability*), dan dapat dibandingkan(*comparability*).

Salah satu indikator kualitas laporan keuangan bisa dilihat dari opini auditor eksternal (BPK) atas penyajian laporan keuangan pemerintah, yang terdiri dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL), dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang komponennya meliputi: Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas,

dan Catatan atas Laporan Keuangan. Opini BPK secara bertingkat terdiri dari: Tidak Wajar (TW), Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer*), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan yang terbaik adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Keberhasilan dalam penyajian laporan keuangan yang berkualitas bergantung pada pelaksanaannya atau Sumber Daya Manusianya (SDM). Didalam pemerintahan, SDM atau kepegawaian PNS diatur dengan UU Nomor 43 tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian. Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan dengan bekal pendidikan, pelatihan, pengalaman, sertifikasi, maupun uji kompetensi yang memadai. Dalam variabel ini sumber daya manusia mengukur bagaimana kualitas sumber daya manusia pada umumnya. Dari hasil penelitian (Basukianto, 2015) meskipun pemerintahan Provinsi Jawa Tengah mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tetapi hasil menunjukkan bahwa 105 responden (74,47%) menyatakan bahwa jumlah pegawai/staf yang berlatar belakang akuntansi belum memadai, dan hanya 36 responden (25,53%) sudah cukup memadai. Hal ini menunjukkan bahwa yang berlatar belakang akuntansi masih rendah. Menurut hasil penelitian (Rama Mahaputra & Putra, 2014), (Basukianto, 2015) menunjukkan Kompetensi SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan. Adapun Hasil temuan yang menunjukkan ketidakkonsistenan antara penelitian satu dengan penelitian lainnya yaitu penelitian (Indrisari, Desi, & Nahartyo, 2008) dan (Zuliarti, 2012) menunjukkan sumber daya manusia berpengaruh negatif terhadap keandalan laporan keuangan.

Dalam memperoleh kualitas laporan keuangan yang baik tentunya SDM harus memahami regulasi Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Dalam hal Sumber Daya Manusia diukur dengan lebih spesifik yaitu tentang pemahamannya terhadap regulasi standar akuntansi berbasis akrual. Definisi pemahaman regulasi adalah pemahaman anggota/pegawai mengenai peraturan, prosedur dan kebijakan tentang peraturan daerah. Peraturan yang dimaksud adalah pedoman yang harus dilakukan serta prosedur terkait dengan serangkaian strategi untuk mencapai tujuan.

Dalam rangka peningkatan kualitas informasi pelaporan keuangan, pemerintah merevisi PP No. 24 Tahun 2005 dengan mengeluarkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP yang berbasis akrual. Penerapan akuntansi berbasis akrual diperlukan untuk menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik, serta untuk memfasilitasi manajemen keuangan/aset yang lebih transparan dan akuntabel. Perubahan regulasi akuntansi pemerintah dari basis kas ke basis akrual cukup kompleks sehingga diperlukan pemahaman yang utuh mengenai konsep akuntansi. Jika pemahaman regulasi atas tersebut rendah maka kualitas laporan keuangan menjadi rendah. Dasar pemikirannya adalah pemahaman terhadap aturan yang tidak penuh mengindikasikan implementasi aturan cenderung menggunakan insting dibandingkan aturan yang berlaku. Rendahnya keterampilan dasar mengenai pemahaman menjadi salah satu hambatan dalam penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual di Fiji (Tickell, 2010). Mardiasmo mengatakan "implementasi ini harus sudah dijalankan agar tidak lupa dengan amanat Undang-Undang tersebut. Dia mengatakan pemerintah telah melakukan persiapan untuk menerapkan akuntansi pemerintahan berbasis akrual seperti penyesuaian regulasi di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan, pembangunan sistem aplikasi, peningkatan kapasitas SDM serta penguatan komitmen penyelenggaraan pemerintah. Kompetensi standard untuk SDM sudah ada, sistem akuntannya sudah ada dan sudah di luncurkan, sosialisasi juga sudah dilakukan agar SDM mampu memahami tentang SAP berbasis akrual ." Masing-masing kementertian dan lembaga juga ditunjuk Duta Akrual yang diharapkan dapat menciptakan komunikasi dan koordinasi serta menjadi fasilitator atas perubahan penerapan basis akuntansi akrual di pemerintah pusat. Nantinya akuntansi berbasis akrual ini juga akan diterapkan ke pemerintah daerah (mardiasmo, 2015). Walaupun semuanya sudah dijalankan dalam persiapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual tetapi opini yang diberikan BPK kepada pemerintah pusat pada tahun anggaran 2015 yakni Wajar Dengan Pengecualian (WDP) hal ini mengakibatkan kualitas laporan keuangan di pemerintahan pusat masih belum mencapai WTP. Dari hasil uji penelitian (Kiranayanti & Erawati, 2016) Variabel Pemahaman Atas Regulasi Sistem Akuntansi

Pemerintahan berbasis akrual berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Selain itu yang bisa mempengaruhi kualitas laporan keuangan ialah sistem pengendalian internalnya. Dalam PP 60 tahun 2008 tentang Sistem pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) peraturan ini mengadopsi model Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). Menurut COSO sistem pengendalian merupakan proses kegiatan yang dilakukan di dalam entitas (organisasi, termasuk perusahaan), dipengaruhi oleh dewan komisaris (atau dewan pengawas serupa), manajemen, dan personel lainnya, dirancang untuk memberikan jaminan yang layak agar entitas mencapai tujuan-tujuannya. Adapun kerangka SPIP dalam PP 60/2008 antara lain, Lingkungan pengendalian, Penilaian risiko, Kegiatan pengendalian, Informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Walaupun banyak provinsi atau kota/kabupaten yang memiliki kualitas laporan keuangan baik dan mendapat opini WTP tetapi belum tentu memiliki pengendalian internal yang baik, seperti yang dikemukakan oleh (Purnomo, 2012) bahwa WTP tidak menjamin tidak ada korupsi di lembaga yang memperoleh opini demikian. WTP menjadi obsesi pimpinan lembaga, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sampai melayangkan kritik, WTP seolah menjadi ajang pameran pimpinan lembaga pusat dan daerah. Bahkan ada kepala daerah yang memerintahkan anak buahnya menyuap auditor BPK agar hasil pemeriksaan beropini WTP. Seperti kasus dua orang auditor BPK perwakilan Jawa Barat yang divonis masing-masing empat tahun penjara karena menerima suap ratusan juta dari pejabat Pemerintah kota Bekasi. Uang suap itu diberikan agar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Bekasi memuat WTP.

Selain SDM setiap instansi pasti membutuhkan teknologi informasi yaitu berupa Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA Keuangan)/ Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKDA) yang dipergunakan sebagai alat bantu untuk meningkatkan efektifitas implementasi berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang didasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel. merupakan suatu aplikasi yang dibuat dan dikembangkan

oleh BPKP dengan tujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya. Dengan aplikasi ini, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi dan akurat, dimulai dari penganggaran, penatausahaan hingga akuntansi dan pelaporannya. SIMDA Keuangan sudah digunakan lebih dari 400 pemerintah daerah di Indonesia. Bahkan, sekarang dengan berlakunya akuntansi pemerintahan berbasis akrual basis, pemda yang menggunakan SIMDA Keuangan akrual basis sudah hampir mencapai 500 pemda (bpkp.go.id, 2015). Walaupun Provinsi Kalimantan timur mendapat opini WTP tetapi dalam penerapan SIMDA masing masing SKPD belum sepenuhnya terintegritas dikarenakan masih ada permasalahan dan kendala dalam pemungutan pajak dan retribusi yang tidak sesuai dengan aturan. Menurut Maulidyah “selama ini dalam pelaksanaannya terdapat berbagai macam permasalahan dan kendala. Seperti belum terintegrasinya SIMDA pendapatan ke SIMDA keuangan yang mengakibatkan operator harus menginput kembali ke SIMDA keuangan” (prokal.co, 2015). Menurut hasil penelitian (Dewi & Mimba, 2014) penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. berbeda dengan hasil penelitian (siahaan & fachruzamman, 2013) Sistem Manajemen Akuntansi tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

Dalam catatan atas laporan keuangan Kota Bandung tahun 2015 bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan telah memenuhi karakteristik kualitas laporan keuangan yang baik yakni menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi; Menyajikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran maupun antar periode; Menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya. Untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi Laporan Keuangan Pemerintahan maupun daerah diperlukan adanya pemeriksaan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Opini

yang diraih Kota Bandung pada tahun 2015 mendapatkan opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) hal ini dikarenakan persoalan asset dan piutang pajak diantaranya aset senilai 11,07 triliun disajikan tidak berdasarkan nilai perolehan atau nilai wajar, senilai 502,97 miliar tidak diketahui keberadaannya dan senilai 47,38 miliar tidak didukung rincian dan masih adanya sarana dan prasarana umum yang belum tercatat. Untuk piutang pajak senilai 1,10 miliar tidak diakui oleh Wajib pajak dan senilai 4,64 miliar tidak dapat ditelusuri.

Berdasarkan fenomena dan kesimpulan dari penelitian terdahulu yang telah disebutkan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemahaman Regulasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua, Sistem Pengendalian Internal dan Penerapan Sistem Manajemen Keuangan Daerah terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandung.”**

### **1.3 Rumusan Masalah**

Kualitas laporan keuangan pada Kota Bandung masih lemah. Hal ini di buktikan dengan Laporan Keuangan Kota Bandung dari 6 tahun terakhir masih bertahan dengan opini Wajar Dengan Pengecuali (WDP) bahkan pada tahun 2009 mendapat opini Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer*) hal ini dikarenakan dalam penyajian dan pengungkapan dana bergulir pada masyarakat tidak disajikan sesuai nilai bersih yang dapat direalisasikan sebagaimana dinyatakan dalam standar akuntansi pemerintahan. di tahun 2010 cukup meningkat dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) Serta di tahun 2011-2015 masih konsisten dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) ini dikarenakan masih adanya masalah dalam pengelolaan asetnya.

Hal ini di perkuat dengan beberapa penelitian yang terlebih dahulu meneliti, ini dimungkinkan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan yaitu: Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemahaman Regulasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua, Sistem Pengendalian Internal dan



Penerapan Sistem Manajemen Keuangan Daerah terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandung.

#### **1.4 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis dapat mengidentifikasi pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian tersebut yaitu:

- 1) Bagaimana Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemahaman Regulasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua, Sistem Pengendalian Internal dan Penerapan Sistem Manajemen Keuangan Daerah dan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandung.
- 2) Apakah Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemahaman Regulasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua, Sistem Pengendalian Internal dan Penerapan Sistem Manajemen Keuangan Daerah secara simultan berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandung?
- 3) Bagaimana pengaruh secara parsial :
  - a) Apakah Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan keuangan ?
  - b) Apakah Pemahaman Regulasi Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan keuangan ?
  - c) Apakah pengaruh secara parsial Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kualitas Laporan keuangan ?
  - d) Apakah pengaruh secara parsial Penerapan Sistem Manajemen Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan keuangan ?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian bahwa dapat diidentifikasi bahwa tujuan dari penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui Bagaimana Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemahaman Regulasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua, Sistem

Pengendalian Internal dan Penerapan Sistem Manajemen Keuangan Daerah dan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandung.

- 2) Untuk menganalisis apakah Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemahaman Regulasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua, Sistem Pengendalian Internal dan Penerapan Sistem Manajemen Keuangan Daerah secara simultan berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandung.
- 3) Untuk menganalisis secara parsial :
  - a) Untuk menganalisis apakah Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan keuangan di Kota Bandung.
  - b) Untuk menganalisis apakah Pemahaman Regulasi Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan keuangan di Kota Bandung.
  - c) Untuk menganalisis apakah Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kualitas Laporan keuangan di Kota Bandung.
  - d) Untuk menganalisis apakah Penerapan Sistem Manajemen Daerah Keuangan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan keuangan di Kota Bandung.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca maupun peneliti selanjutnya, baik secara aspek teoritis maupun praktis, seperti berikut ini:

### **1.6.1 Aspek Teoritis**

Bagi Peneliti selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya mengenai faktor faktor apa saja yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan.

### **1.6.2 Aspek Praktis**

Bagi pemerintahan daerah Kota Bandung, penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dalam memperbaiki Kualitas laporan keuangan dan Penelitian ini diharapkan pula agar dapat menambah serta meningkatkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan Pemerintahan Kota Bandung, sehingga dapat meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan di Pemerintahan Kota Bandung.

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Pada sistematika penulisan, penulis akan menjelaskan secara ringkas mengenai bab demi bab, yang terdiri dari lima bab untuk membantu penulis mempermudah pembahasan dan mengarahkan pemikiran penulis pada kerangka acuan yang telah ditentukan dengan sistematis. Urutan penulisan bab yang akan disajikan adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memberikan penjelasan mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian yang mengangkat fenomena yang menjadi isu penting sehingga layak untuk diteliti disertai dengan argumen teoritis yang ada, perumusan masalah yang didasarkan pada latar belakang penelitian, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian ini secara teoritis dan praktis serta sistematika penulisan secara umum.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas mengenai teori yang menjadi dasar bagi penelitian dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan, kerangka pemikiran yang membahas rangkaian pola pikir untuk menggambarkan masalah penelitian, hipotesis penelitian sebagai jawaban sementara atas masalah penelitian, dan ruang lingkup penelitian yang menjelaskan dengan rinci batasan dan cakupan penelitian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan mengenai jenis penelitian, variabel operasional, tahapan penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan mengenai langkah-langkah analisis data dan hasil analisis data yang telah diperoleh dengan menggunakan alat analisis yang diperlukan serta pembahasan hasil penelitian yang diperoleh.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini membahas mengenai kesimpulan peneliti yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan. Selain itu juga disertakan saran yang berguna bagi instansi maupun penelitian selanjutnya.

